



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

(LKPJ)

&

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)**

TAHUN 2024

**DINAS PERTERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024. Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 demi terselenggaranya Good Governance yang merupakan persyaratan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Seiring dengan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2024 belum ditemukan permasalahan yang berarti namun Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut beserta segenap jajarannya berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun kritik dan saran membangun senantiasa diharapkan sebagai barometer perbaikan kinerja dimasa yang akan datang

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan kedepan.

Pelaihari, Januari 2025

KEPALA DINAS

DINAS PERTERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
H. IWAN PERSADA, S.Pt
NIP. 196801031989031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
 - a. Struktur Organisasi
 - b. Kepegawaian
 - c. Kondisi sarana dan Prasarana

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

- 1. Urusan Pilihan
 - a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Restra dan Renja)
 - b. Program kegiatan
 - c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - d. Permasalahan dan solusi.

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V PENUTUP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi selaku Dinas Teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban memeberikan informasi bidang peternakan mulai dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan serta komoditas pereernakan beserta pola perwilayahan pengemabnagannya serta program program yang telah dijalankan, serta membuka peluang pengembangan bidang peternakan mulai aspek usaha (bisnis), sesuai dengan mitra yang akan berkerjasama dalam penegembangan Bersama peemerintah Kabupaten Tanah Laut.

B. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok yang terdiri dari masing-masing bidang kerja di lingkungan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan Sekretaris beserta Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang beserta Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Setiap pimpinan dibidang kerja lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi kerja di bawahannya atau pegawai

yang membantu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, serta akuntabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, tergambar sebagai berikut :

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

- a. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian serta ketatausahaan.
- b. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbibitan, produksi dan pengembangan pakan ternak.
- c. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Bidang Kesmavet, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil.

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut memiliki 12 jenis pelayanan sebagai produk organisasi, antara lain:

- a. Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan dan Vaksinasi) dan Pelayanan Reproduksi ternak

- b. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Asal Hewan.
- c. Pelayanan Pengujian Sampel Penyakit Hewan dan Pengujian Sampel Pangan Asal Hewan
- d. Pelayanan Pembinaan dan Pelatihan Peternakan Bagi Kelompok Tani
- e. Pelayanan Pengolahan Data Peternakan dan Kesehatan Hewan
- f. Pelayanan Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Peternakan
- g. Pelayanan Rekomendasi Usaha Peternakan dan Permodalan
- h. Pelayanan Bantuan Prasarana dan Sarana Peternakan
- i. Pelayanan Bantuan Penyebaran dan Pengembangan Ternak
- j. Pelayanan Retribusi Ternak
- k. Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan
- l. Pelayanan Peningkatan SDM Petugas Peternakan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2013 unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan bagi setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan transaksi jual beli ternak, Pengguna Fasilitas Pasar Ternak, Jasa Pelayanan (Pemeriksaan) Kesehatan Ternak, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar, Kebersihan Pasar dan Penanganan Limbah Pasar, Melakukan Pengawasan Terhadap Pengeluaran Ternak dan atau Ternak Bibit dari Wilayah Kabupaten Tanah Laut, pemotongan hewan ternak dan penanganan daging, melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia, dan mendukung secara teknis program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pemasaran dan rumah potong hewan.

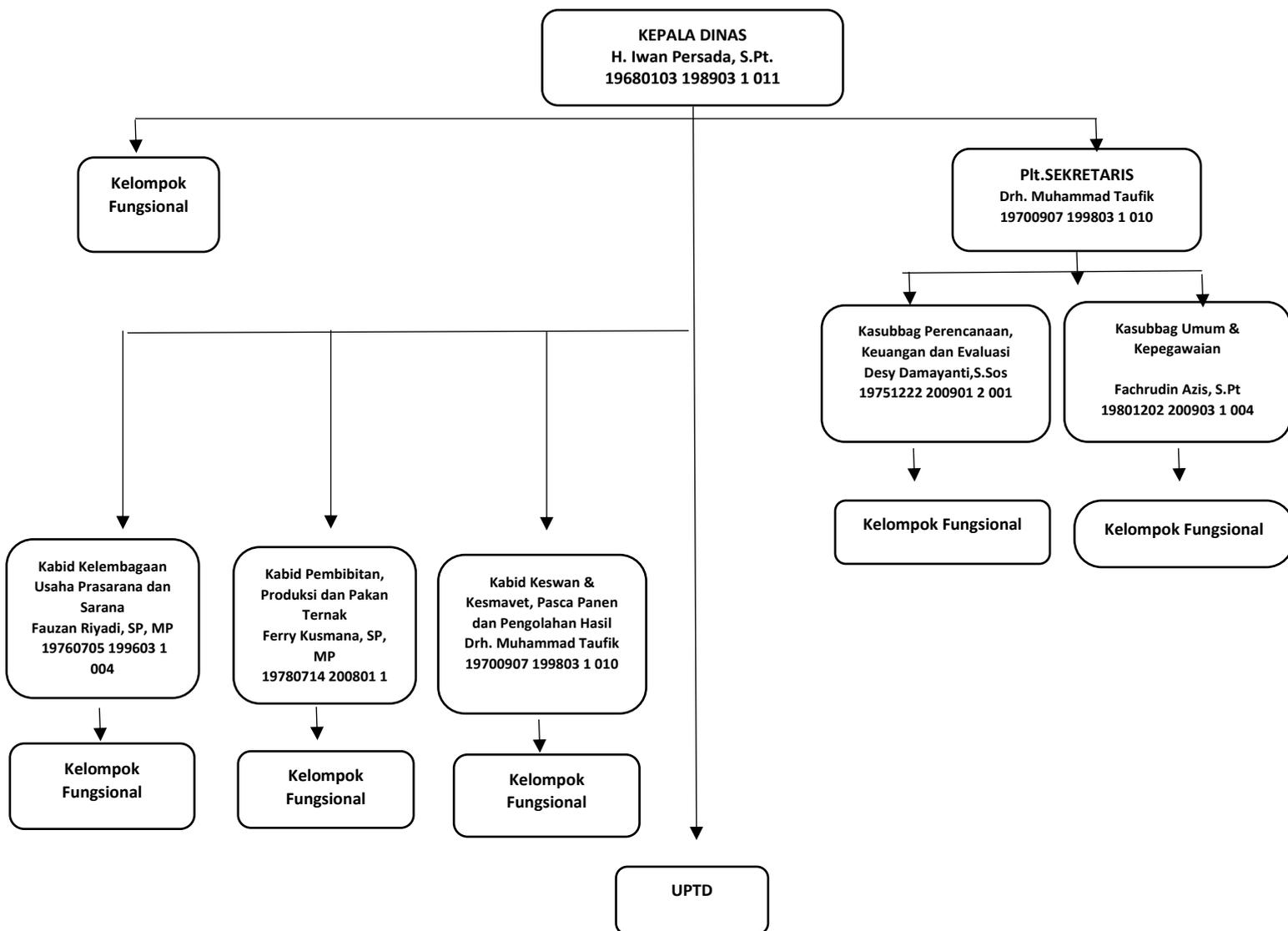
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Takisung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Batu Ampar yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Panyipatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 tahun 2015. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Kurau dibentuk tahun 2020. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat

Kesehatan Hewan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hewan yang sakit dan mendukung secara teknis program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pelayanan kesehatan hewan.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANSASI



b. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2024 adalah 40 orang ASN yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 15 Orang, Staf 15 orang dan pejabat fungsional sebanyak 9 orang, meliputi :

1. Kepala Dinas	: 1 orang
2. Sekretaris	: - orang
3. Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	: 1 orang
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet	: 1 orang
5. Kepala Bidang KUPS	: 1 orang
6. Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
7. Ka Sub Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	: 1 orang
8. Kepala UPT. Puskesmas Kec. Takisung	: 1 orang
9. Kepala UPT. Puskesmas Kec. Batu Ampar	: 1 orang
10. Kepala UPT. Puskesmas Kec. Panyipatan	: 1 orang
11. Kepala UPT. Puskesmas Kec. Kurau	: 1 orang
12. Kepala UPT Pasar Hewan dan RPH	: 1 orang
13. Kasubbag TU. UPT Pasar Hewan dan RPH	: 1 orang
14. Kasubbag TU. UPT. Puskesmas Kec. Takisung	: 1 orang
15. Kasubbag TU. UPT. Puskesmas Kec. Panyipatan	: 1 orang
16. Kasubbag TU. UPT. Puskesmas Kec. Batu Ampar	: 1 orang
17. JFT. Medik Veteriner	: 3 orang
18. JFT. Paramedik Veteriner	: 5 orang
19. JFT. Pengawas Bibit Ternak Pertama	: 1 orang
20. JFT. Pengawas Bibit Ternak Muda	: 4 orang
21. JFT. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	: 1 orang

22. JFT. Pranata Komputer Lanjutan	: 1 orang
23. Pelaksana	: 7 orang
24. PPPK	: 2 orang
25. Non ASN	: 26 orang

Dari segi sarana dan prasarana serta anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki anggaran yang sudah maksimal dalam hal membantu operasional kegiatan baik itu di kantor maupun di lapangan, melalui adanya 5 program, 15 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang diampu oleh bidang bidang terkait pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi

Tabel 1

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang		Keadaan Barang		
		Jumlah	Satuan	B	KB	RB
1	2	3		4	5	6
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	826	m2	Ö		
2	Tanah Bangunan Pasar	11768	m2	Ö		
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6480	m2	Ö		
4	Tanah Bangunan Laboratorium	788	m3	Ö		
5	Tanah Bangunan Kandang Hewan	302	m4	Ö		
6	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	6593	m5	Ö		
7	Tanah Pertanian lainnya	23578	m6	Ö		

8	AC SPLIT	18	UNIT	18		
9	Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	UNIT	1		
10	Alat Kedokteran umum lainnya	30	UNIT	30		
11	Alat pasca panen lainnya (dst)	4	UNIT	4		
12	Alat Pembersih lainnya	12	UNIT	3	9	
13	Alat Pengering (Dryer)	1	UNIT	1		
14	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	1	UNIT	1		
15	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1	UNIT	1		
16	Alat Peternakan lainnya	42	UNIT	40	2	
17	Alat Reproduksi lainnya	1	UNIT	1		
18	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	UNIT	1		1
19	Bangku Tunggu	11	UNIT	11		
20	Camera Electronic	4	UNIT		3	
21	Container	21	UNIT	15	6	
22	External/ Portable Hardisk	3	UNIT		3	
23	Filing Cabinet Besi	7	UNIT	7		
24	Genset	5	UNIT	5		
25	Global Positioning System	4	UNIT		4	
26	Gerobak Dorong	6	UNIT	5	1	
27	Handy Cam	1	UNIT		1	
28	Karpet	1	UNIT	1		
29	Gunting Lurus	1	UNIT	1		
30	Pompa Air	4	UNIT	4		
31	Station Wagon	2	UNIT	2		
32	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	UNIT	3		
33	Pick Up	3	UNIT	2		
34	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	3	UNIT	1		
35	Sepeda Motor	17	UNIT	15	2	
36	Termometer Standar	1	UNIT			1

37	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	10	UNIT	10		
38	Lemari Penyimpan	2	UNIT	2		
39	Unit Pengaduk	1	UNIT	1		
40	Tang Pemasang/Kar Tang	1	UNIT	1		
41	Stick Pengukur Sapi	1	UNIT	1		
42	Tabung Tempat Susu	5	UNIT	5		
43	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	UNIT	1		
44	Lemari Besi/Metal	15	UNIT	15		
45	Lemari Kayu	5	UNIT	5		
46	Lemari Kaca	4	UNIT	4		
47	White Board	6	UNIT	6		
48	Papan Nama Instansi	5	UNIT	5		
49	Papan Pengumuman	3	UNIT	3		
50	Meja Kerja Kayu	36	UNIT	36		
51	Meja Rapat	50	UNIT	50		
52	Meja Resepsionis	1	UNIT	1		
53	Kursi Rapat	61	UNIT	61		
54	Kursi Tamu	3	UNIT	3		
55	Kursi Putar	24	UNIT	24		
56	Kursi Biasa	20	UNIT	20		
57	Sofa	3	UNIT	3		
58	Mesin Pemotong Rumput	6	UNIT	6		
59	Lemari Es	3	UNIT	3		
60	Treng Air/Tandon Air	5	UNIT	5		
61	Televisi	7	UNIT	7		
62	Sound System	2	UNIT	2		
63	Unit Power Supply	2	UNIT	2		
64	Tiang Bendera	4	UNIT	4		
65	Tangga Aluminium	1	UNIT	1		
66	Tangga	1	UNIT	1		

67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	UNIT	5		
68	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	31	UNIT	31		
69	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	UNIT	2		
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	UNIT	6		
71	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	UNIT	5		
72	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	UNIT	2		
73	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	UNIT	7		
74	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2	UNIT	2		
75	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	UNIT	2		
76	Layar Film/Projector	2	UNIT	2		
77	Microscope Binocular	4	UNIT	4		
78	Uninterrupted Power Supply (UPS)	20	UNIT	20		
79	P.C Unit	30	UNIT	30		
80	Lap Top	11	UNIT	11		
81	Note Book	5	UNIT	5		
82	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	30	UNIT	30		
83	Wireless Access Point	1	UNIT	1		

Tabel 2**Luas Lahan Padang Pengembalaan dan Hijauan Pakan Ternak**

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL	JENIS AREAL
1.	Pelaihari	22 Ha	Kebun Rumput (HMT)
2.	Batu Ampar	36 Ha	Padang pengembalaan 35 Ha Kebun Rumput (HMT) 1 Ha
3.	Jorong	1003 Ha	Kebun Rumput (HMT) 3 Ha Padang pengembalaan 1000 Ha
4.	Bajuin	13,5 Ha	Kebun Rumput (HMT) 1 Ha
5.	Takisung	21 Ha	Kebun Rumput (HMT) 1 Ha Padang pengembalaan 20 Ha
6.	Bati-Bati	202,5 Ha	Kebun Rumput (HMT) 2,5 Ha Padang pengembalaan 200 Ha
7.	Panyipatan	84,5	Kebun Rumput (HMT) 4,5 Ha Padang pengembalaan 20 Ha
Total		1.382,5 Ha	Kebun Rumput (HMT) 15,2 Ha Padang pengembalaan 1354,8 Ha

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki IKK Outcome dan IKK Outcome yang didefinisikan sebagai presentasi penurunan kejadian dan jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular sebagai berikut :

Tabel 3
Perhitungan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{(\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t)} - \text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya})}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$

Tabel : 4
Penjelasan IKK Output

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) dikurangi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) dikurangi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya adalah Jumlah keseluruhan kejadian/kasus

Tabel : 5
Penjelasan IKK Outcome

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1)	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ <p>Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular</p>	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Urusan Pilihan

1. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Restra dan Renja)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menilai perkembangan suatu daerah. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai dan bersifat inklusif maka distribusi kesejahteraan akan terjadi. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah investasi.

Investasi menjadi bagian yang penting bagi suatu daerah, mengingat investasi akan memberikan dampak perekonomian yang baik apabila dikelola dengan baik terhadap daerah. Selain itu juga, dengan adanya Pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan Timur yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru ke Kalimantan diharapkan dapat memberikan efek positif karena adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan serta diprediksi akan meningkatkan perekonomian daerah di wilayah Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur ini membutuhkan dukungan logistik kepada IKN dari wilayah sekitarnya termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memerlukan persiapan penyangga pangan baru.

Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Memiliki Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang mengampu pada Restra dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 pada urusan pilihan daerah yang menjadi tanggungjawab penuh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri dari : 5 Program, 15 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan

2. Program Kegiatan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Memiliki 5 program yang mendukung pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
5. Program Penyuluhan Pertanian

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Memiliki 5 program 15 Kegiatan 33 Sub Kegiatan yang mendukung pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi :

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4=3/2*100	5=2-3
	16.604.234.387	14.568.474.271	87,74	2.035.760.116
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	12.793.158.139	11.136.577.738	87,05	1.656.580.401
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.934.193	9.930.400	99,96	3.793
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.648	4.999.600	100	48
- Belanja Bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor	4.999.648	4.999.600	100	48
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.934.545	4.930.800	99,92	3.745
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.934.545	4.930.800	99,92	3.745

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.536.097.953	6.671.253.985	88,52	864.843.968
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.531.696.098	6.666.852.185	88,52	864.843.913
Gaji dan Tunjangan ASN & PPPK	7.531.696.098	6.666.852.185	88,52	864.843.913
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.401.855	4.401.800	100	55
Belanja Bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor	4.401.855	4.401.800	100	55
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.615.000	75.700.000	71,68	29.915.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.000.000	29.200.000	54,07	24.800.000
- Belanja Bimbingan Teknis	54.000.000	29.200.000	54,07	24.800.000
				-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.615.000	46.500.000	90,09	5.115.000
- Belanja Pakaian Dinas Harian	24.420.000	22.000.000	90,09	2.420.000
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan	27.195.000	24.500.000	90,09	2.695.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.197.924.311	1.182.414.496	98,71	15.509.815
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.902.119	12.331.400	95,58	570.719
- Belanja Bahan bakar dan pelumas	2.910.000	2.878.900	98,93	31.100
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik	9.992.119	9.452.500	94,60	539.619
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.777.771	137.027.045	95,30	6.750.726

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.638.606	7.483.245	77,64	2.155.361
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas cover	14.500.399	13.037.800	89,91	1.462.599
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos	500.000	500.000	100	-
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan computer	8.075.595	6.810.000	84,33	1.265.595
- Belanja modal personal computer	111.063.171	109.196.000	98,32	1.867.171
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.694.435	12.370.000	90,33	1.324.435
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor	13.694.435	12.370.000	90,33	1.324.435
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	23.049.986	20.897.200	90,66	2.152.786
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan alat tulis kantor	23.049.986	20.897.200	90,66	2.152.786
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.800.000	75,00	600.000
- Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	2.400.000	1.800.000	75,00	600.000
Penyediaan Bahan/Material	14.100.000	13.000.000	92,20	1.100.000
- Belanja jasa penyelenggara jasa	14.100.000	13.000.000	92,20	1.100.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	988.000.000	984.988.851	99,70	3.011.149
- Belanja makanan dan minuman rapat	63.000.000	60.375.000	95,83	2.625.000
- Belanja perjalanan dinas biasa	875.000.000	874.883.851	99,99	116.149

- Belanja perjalanan dinas dalam kota	50.000.000	49.730.000	99,46	270.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.220.742.195	1.825.777.025	82,21	394.965.170
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	542.314.000	488.177.000	90,02	54.137.000
- Belanja modal kendaraan bermotor penumpang	517.339.000	465.700.000	90,02	51.639.000
- Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua	24.975.000	22.477.000	90,00	2.498.000
Pengadaan Mebel	248.888.223	225.127.625	90,45	23.760.598
- Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	19.538.557	17.602.304	90,09	1.936.253
- Belanja modal mebel	157.199.666	138.225.321	87,93	18.974.345
- Belanja modal alat rumah tangga lainnya	72.150.000	69.300.000	96,05	2.850.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	393.760.512	384.692.300	97,70	9.068.212
- Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya	224.596.512	218.727.100	97,39	5.869.412
- Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya	169.164.000	165.965.200	98,11	3.198.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.035.779.460	727.780.100	70,26	307.999.360
- Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja	213.840.000	-	0,00	213.840.000
- Belanja modal bangunan gedung kantor	124.342.200	120.178.400	96,65	4.163.800
- Belanja modal bangunan gedung garasi	185.709.660	179.695.700	96,76	6.013.960
- Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya	281.274.000	273.422.000	97,21	7.852.000
- Belanja modal taman	71.040.000	0	0,00	71.040.000

- Belanja modal pagar	159.573.600	154.484.000	96,81	5.089.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	847.454.692	767.505.009	90,57	79.949.683
Penyediaan jasa komunikasi, penunjang sumber daya air dan listrik	97.000.000	86.969.953	89,66	10.030.047
- Belanja Tagihan Air	12.000.000	2.077.000	17,31	9.923.000
- Belanja Tagihan Listrik	85.000.000	84.892.953	99,87	107.047
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	750.454.692	680.535.056	90,68	69.919.636
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi (15 orang x 12 bln)	360.000.000	342.000.000	95,00	18.000.000
- Belanja Jasa Kebersihan (4 orang x 12 bln)	96.000.000	96.000.000	100	-
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan (10 orang x 12 bln)	240.000.000	198.000.000	82,50	42.000.000
- Belanja jasa JK Kesehatan non ASN (29 orang x 12 bln)	48.720.000	41.100.656	84,36	7.619.344
- Belanja jasa JK Kecelakaan non ASN (29 orang x 11 bln)	2.548.752	1.526.400	59,89	1.022.352
- Belanja jasa JK Kematian non ASN (29 orang x 11 bln)	3.185.940	1.908.000	59,89	1.277.940
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	875.389.795	603.996.823	69,00	271.392.972
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	29.890.950	99,64	109.050
- Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor perorangan	30.000.000	29.890.950	99,64	109.050
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.320.000	159.394.667	95,84	6.925.333

- Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor penumpang	121.000.000	120.886.900	99,91	113.100
- Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor beroda dua	32.000.000	26.507.767	82,84	5.492.233
- Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor beroda tiga	13.320.000	12.000.000	90,09	1.320.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.395.400	10.318.840	99,26	76.560
- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	3.000.000	2.993.840	99,79	6.160
- Belanja pemeliharaan computer	7.395.400	7.325.000	99,05	70.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	668.674.395	404.392.366	60,48	264.282.029
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	668.674.395	404.392.366	60,48	264.282.029
<i>Penunjang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	1.207.982.175	1.039.280.000	86,03	168.702.175
Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan,tumbuhan dan mikro organisme	323.982.464	236.120.000	72,88	87.862.464
Pemanfaatan Kualiatas SDG Hewan/Tanaman	323.982.464	236.120.000	72,88	87.862.464
- Belanja bahan - bahan kimia	121.323.000	62.160.000	51,24	59.163.000
- Belanja bahan - bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	35.626.560	19.200.000	53,89	16.426.560
- Belanja Bahan Lainnya	28.753.895	25.706.000	89,40	3.047.895
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.759.212	1.674.000	95,16	85.212
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.909.319	6.760.000	85,47	1.149.319
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.900.142	1.700.000	89,47	200.142
- Belanja Obat-obatan Lainnya	10.911.879	9.660.000	88,53	1.251.879

- Belanja Makan Minum Rapat	32.400.000	28.575.000	88,19	3.825.000
- Belanja Bimbingan Teknis	19.600.000	19.600.000	100	-
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.114.000	9.955.000	82,18	2.159.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.685.000	49.680.000	99,99	5.000
- Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.120.000	600.000	53,57	520.000
- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	879.457	850.000	96,65	29.457
Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota	883.999.711	803.160.000	90,86	80.839.711
Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	883.999.711	803.160.000	90,86	80.839.711
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor Tulis Kantor	2.130.016	632.000	29,67	1.498.016
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	2.480.000	2.480.000	100	-
- Belanja Makanan dan Minuman	23.625.000	18.675.000	79,05	4.950.000
- Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana	26.400.000	26.400.000	100	-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	91.690.000	91.635.000	99,94	55.000
- Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba	737.674.695	663.338.000	89,92	74.336.695
<i>Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	866.194.105	775.064.208	89,48	91.129.897
Pengembangan prasarana pertanian	174.995.530	147.035.000	84,02	27.960.530
Koordinasi dan sinkronisasi prasarana Pendukung Pertanian lainnya	174.995.530	147.035.000	84,02	27.960.530
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.384.530	400.000	28,89	984.530
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos	500.000	500.000	100	-

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000	-	0,00	1.575.000
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	21.750.000	10.735.000	49,36	11.015.000
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	149.786.000	135.400.000	90,40	14.386.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	691.198.575	628.029.208	90,86	63.169.367
Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	331.336.888	304.561.604	91,92	26.775.284
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya	2.140.000	2.140.000	100	-
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos	600.000	600.000	100	-
- Belanja Makan dan Minum Rapat	3.150.000	3.150.000	100	-
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.600.000	5.600.000	100	-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	32.500.000	32.300.000	99,38	200.000
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	287.346.888	260.771.604	90,75	26.575.284
Pembangunan, Rehabilitas, Pemeliharaan dan operasional Rumah Potong Hewan	359.861.687	323.467.604	89,89	36.394.083
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	8.091.900	6.121.000	75,64	1.970.900
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan parker	102.547.500	91.011.117	88,75	11.536.383
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal rumah negara golongan I	87.552.000	77.642.806	88,68	9.909.194

- Belanja modal alat kantor lainnya	25.414.405	22.790.000	89,67	2.624.405
- Belanja modal alat rumah tangga lainnya	17.101.282	15.360.000	89,82	1.741.282
- Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga	119.154.600	110.542.681	92,77	8.611.919
<i>Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i>	1.355.495.522	1.279.031.500	94,36	76.464.022
Penjaminan kesehatan hewan, penutupan & pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	1.284.744.085	1.212.647.100	94,39	72.096.985
Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pd Hewan	110.235.203	95.013.600	86,19	15.221.603
- Belanja bahan kimia	75.763.095	61.135.000	80,69	14.628.095
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis	466.510	385.600	82,66	80.910
- Belanja natura dan pakan natura dan pakan lainnya	1.080.598	858.000	79,40	222.598
- Belanja jasa Tenaga Ahli	12.150.000	12.150.000	100	-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	20.775.000	20.485.000	98,60	290.000
Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 daerah	1.174.508.882	1.117.633.500	95,16	56.875.382
Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 daerah Kab atau Kota	1.174.508.882	1.117.633.500	95,16	56.875.382
- Belanja bahan kimia	118.780.992	111.101.000	93,53	7.679.992
- Belanja bahan-bahan lainnya	75.932.467	68.492.500	90,20	7.439.967
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor alat tulis	677.096	570.000	84,18	107.096
- Belanja obat lainnya	877.451.792	838.293.000	95,54	39.158.792
- Belanja jasa tenaga lab	14.523.330	13.660.000	94,06	863.330
- Belanja jasa pengolahan sampah	10.118.205	8.512.000	84,13	1.606.205
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	77.025.000	77.005.000	99,97	20.000

Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan & produk hewan daerah kab.	21.989.733	21.124.650	96,07	865.083
Pengawasan dan pemeriksaan keswan, produk hewan & media pembawa penyakit hewan lainnya	21.989.733	21.124.650	96,07	865.083
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya	363.783	206.000	56,63	157.783
- Belanja makanan & minuman rapat	2.925.000	2.925.000	100	-
- Belanja sewa alat kantor lainnya	1.780.950	1.593.650	89,48	187.300
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	16.920.000	16.400.000	96,93	520.000
Penerapan & pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	48.761.704	45.259.750	92,82	3.501.954
Penmbinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pd unit usaha produk hewan	48.761.704	45.259.750	92,82	3.501.954
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya	3.795.897	2.064.750	54,39	1.731.147
- Belanja natura & pakan natura	2.505.807	1.960.000	78,22	545.807
- Belanja makanan & minuman rapat	2.700.000	2.700.000	100	-
- Honorium narasumber	11.600.000	10.400.000	89,66	1.200.000
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	28.160.000	28.135.000	99,91	25.000
Penyuluhan pertanian	381.404.446	338.520.825	88,76	42.883.621
Pelaksanaan penyuluhan pertanian	381.404.446	338.520.825	88,76	42.883.621
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kec. & desa	381.404.446	338.520.825	88,76	42.883.621
- Belanja bahan lainnya	1.444.365	1.395.000	96,58	49.365
- Belanja alat/bahan kegiatan alat kantor	69.425.552	42.796.500	61,64	26.629.052
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor benda pos	200.000	200.000	100	-

- Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	49.116.967	44.244.000	90,08	4.872.967
- Belanja natura dan pakan-pakan	1.760.000	1.760.000	100	-
- Belanja makanan & minuman rapat	10.350.000	9.450.000	91,30	900.000
- Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	12.600.000	11.250.000	89,29	1.350.000
- Honorium narasumber	10.150.000	9.150.000	90,15	1.000.000
- Honorium tim pelaksana	47.500.000	47.500.000	100	-
- Belanja jasa tenaga ahli	3.000.000	3.000.000	100	-
- Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang	15.000.000	15.000.000	100	-
- Belanja sewa alat kantor lainnya	12.512.562	11.945.325	95,47	567.237
- Belanja sewa mebel	9.435.000	9.050.000	95,92	385.000
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	85.410.000	78.280.000	91,65	7.130.000
- Belanja hadiah lomba	53.500.000	53.500.000	100,0	-

KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)

TAHUN 2024

TAHUN	KECAMATAN	PENYAKIT HEWAN (KASUS)											
		BVD	IBR	SC	RABIES	P.EYE	BEF	ND	AI	JD	HEL	LSD	PMK
2023	Bajuin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	108
	Bati-Bati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-
	Batu Ampar	3	-	-	-	-	4	-	-	1	-	102	44
	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jorong	-	-	9	-	11	13	-	-	9	11	63	60
	Kintap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kurau	-	-	-	-	1	3	-	-	-	3	5	5
	Panyipatan	-	-	16	-	14	32	-	-	-	86	135	19
	Pelaihari	8	-	6	-	-	20	-	-	-	9	147	212
	Takisung	-	-	4	-	5	69	-	-	1	36	1208	98
	Tambang Ulang	-	-	1	-	-	49	-	-	-	7	150	24
	Total		11	-	36	-	31	190	-	-	11	157	1924
Total Seluruh		2930											

Keterangan :

BVD : Bovine viral diarrhea JD : Jembrana BEF : Bovine ephemeral fever
 AI : Avian Influenza ND : New Castle Disease LSD : Lumpy Skin Disease
 SC : Scabies HEL : Helminthiasis
 PAT : Patologis BRU : Brucellosis
 IBR : Infectious Bovine Rhinotracheitis
 P.EYE : Pink eye

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
 ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
 URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
 DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
27	Pertanian	137	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	1,9 %	Presentase penurunan kasus penyakit pasa tahun ini lebih menurun dari tahun sebelumnya

* Ket :

Jumlah Kasus Penyakit :

Tahun 2023 : 3634

Tahun 2024 : 2930

4. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut melaporkan capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Rencana Kinerja (Renja), selama periode 2024 ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut menetapkan 3 (tiga) tujuan yang dibagi menjadi 3 (tiga) sasaran strategik. Selanjutnya sasaran strategik tersebut diwujudkan dalam 5 (Lima) Program serta 15 (Lima Belas) Kegiatan, Sub Kegiatan Sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) dengan anggaran yang berasal dari dana APBD Belanja Rp. 16.604.234.387,- Dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 14.568.474.271,- dan Realisasi Fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 87,74 % Dan adanya pendapatan dengan Target Rp. 315.000.000,- dengan realisasi capaiannya Rp. 356.741.000,- sebesar 113 %.

Dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memiliki permasalahan yang cukup signifikan yang menyebabkan turunnya kinerja SKPD dan diharapkan ditahun berikutnya capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan lebih meningkat.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas ini disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Ada beberapa tugas pembantuan:

- Pemerintah pusat menugaskan daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
- Pemerintah provinsi menugaskan kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
- Pemerintah kabupaten atau kota menugaskan desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Ciri-ciri tugas pembantuan:

- Bukan transfer kewenangan, tetapi pemberian bantuan pelaksanaan tugas
- Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas
- Tersedianya dana, sarana, dan prasarana
- Personil pelaksanaan sebagian besar adalah dari institusi pemberi tugas

Akan tetapi pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memiliki wewenang melaksanakan Tugas Pembantuan

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak melakukan tugas umum pemerintahan secara langsung.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan laporan tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini diatur secara teknis oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang mencakup penyelenggaraan urusan konkuren, urusan tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dari pelaksanaan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 disampaikan secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) . Demikian pembuatan laporan ini banyak sekali kekurangannya dan diharapkan tahun tahun seterusnya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.


H. IWAN PERSADA, S.Pt
NIP. 196801031989031011

